

# ADMINISTRATIO

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Analisis Program Pemberdayaan Desa (PPD)  
Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam  
(Adianto dan Mayarni)

Dampak Sosial Ekonomi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat  
Pada Petambak Garam Kabupaten Sumenep  
(Yuli Yanti Rieskiyah, Sri Utami)

GENDER DAN POLITIK: Studi Kasus Partisipasi Politik Perempuan  
Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Propinsi Banten  
(Delly Maulana)

Implikasi Pemilihan Alternatif Kebijakan Berbasis Kepentingan Elit  
Terhadap Respon Para Stakeholder dan Potensi Marginalisasi Pedagang Kaki Lima  
di Wilayah Perkotaan Kabupaten Klaten  
(Sudarmo)

MEMBENAHAI PARTISIPASI POLITIK RAKYAT : Strategi Pemecahan Masalah Krisis  
Kepercayaan Publik Terhadap Penyelenggaraan Demokrasi Di Indonesia  
(Fajar Apriani)

Pegawai Publik dan Motivasi Pelayanan Publik  
(Syamsir)

Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Hutan dan  
Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Kabupaten Lampung Barat  
(Ari Darmastuti, Feni Rosalia, Tabah Maryanah, Dwi Wahyu Handayani)

Analisa Situasi Kebijakan Penanggulangan TB (Tuberkolosis)  
Di Kota Bandar Lampung  
(Supriyati, Emy Sri Purwani, Jauhari Zailani, Machsun)

RESENSI BUKU; Efek Kedermawanan Pebisnis Dan CSR  
(Hairunnisa)

# ADMINISTRATIO

JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK DAN PEMBANGUNAN



*ADMINISTRATIO* diterbitkan dua kali setahun oleh Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung dan Perhimpunan Sarjana Administrasi (Persadi), sebagai salah satu media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan. Visi *ADMINISTRATIO* adalah menjadi Jurnal Ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan yang kredibel, representatif, konsisten dan terakreditasi tinggi.

## SUSUNAN PENGELOLA *ADMINISTRATIO*

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN PEMBANGUNAN (JAPP)

Penanggung Jawab	: Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si
Dewan Penyunting Ketua	: Prof. Dr. Yulianto, M.S (Unila)
Anggota	: 1. Dr. Edward Antoni M.Si (Persadi Lampung) 2. Dr. Bambang Utoyo, M.Si 3. Dr. Listyo Bawono Irianto, M.Si (UT Jakarta) 4. Dr. Noverman Duadji, M.Si 5. Meiliyana, S.IP, M.A 6. Dr. Dedy Hermawan, M.Si
Penyunting Teknis	: Fery Triatmojo, S.AN., MPA
Adm & Distribusi	: Susana Indriyati C., S.IP., M.Si Ani Agus Puspawati, S.AP., M.A.P
Bendahara	: Dewie Brima Atika, S.IP, M.Si

### Alamat Redaksi:

Gedung B Lt. 1 FISIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Telp/ Fax (0721) 708881,  
e-mail: [administratio\\_app@yahoo.com](mailto:administratio_app@yahoo.com)

*Redaksi menerima tulisan/artikel ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak ilmiah lainnya. Syarat-syarat, format dan tata penulisan dapat dilihat pada petunjuk bagi penulis yang berada pada lembaran belakang jurnal ini.*

**DAFTAR ISI**

<b>Analisis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Adianto dan Mayarni)</b>	<b>1</b>
<b>Dampak Sosial Ekonomi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Pada Petambak Garam Kabupaten Sumenep (Yuli Yanti Rieskiyah, Sri Utami)</b>	<b>13</b>
<b>GENDER DAN POLITIK: Studi Kasus Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Propinsi Banten (Delly Maulana)</b>	<b>25</b>
<b>Implikasi Pemilihan Alternatif Kebijakan Berbasis Kepentingan Elit Terhadap Respon Para Stakeholder dan Potensi Marginalisasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Perkotaan Kabupaten Klaten (Sudarmo)</b>	<b>35</b>
<b>MEMBENAHILAH PARTISIPASI POLITIK RAKYAT : Strategi Pemecahan Masalah Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Penyelenggaraan Demokrasi Di Indonesia (Fajar Apriani)</b>	<b>49</b>
<b>Pegawai Publik dan Motivasi Pelayanan Publik (Syamsir)</b>	<b>59</b>
<b>Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Hutan dan Daerah Aliran Sungai (Das) Di Kabupaten Lampung Barat (Ari Darmastuti, Feni Rosalia, Tabah Maryanah, Dwi Wahyu Handayani)</b>	<b>71</b>
<b>Analisa Situasi Kebijakan Penanggulangan TB (Tuberkolosis) Di Kota Bandar Lampung (Supriyati, Emy Sri Purwani, Jauhari Zailani, Machsun)</b>	<b>85</b>
<b>RESENSI BUKU; Efek Kedermawanan Pebisnis Dan CSR (Hairunnisa)</b>	<b>99</b>

# DAMPAK SOSIAL EKONOMI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT PADA PETAMBAK GARAM KABUPATEN SUMENEP

Yuli Yanti Rieskiyah, Sri Utami  
STIA "AAN" Yogyakarta

## Abstract

*The PUGAR policy evaluation on 2011-2012 of salt farmer's social economic aspect in Sumenep region shows the increasing of salt production quantity amount of 375%. This is really influential with salt production increasing of Indonesia, as Madura is the biggest salt production basis in Indonesia and Sumenep is region that produces salt with the highest quantity and quality. The effect of PUGAR program that turns Indonesia back as a salt consumption self-sufficient country in 2013 is not significantly influence to the salt farmers' social economic aspect. Even that increasing of salt production influences to the decreasing of farmer salts' income. The purpose of this research with qualitative descriptive is finding out the factors of causing income decreasing and the increasing salt production. Based on this research result, researcher recommends the coordination and cooperation among the stakeholders, the reorganization of managing system and salt distribution, also optimizing the KUGAR function.*

**Keywords:** Policy Evaluation, Empowerment, the farmer salt

## A. Pendahuluan

Salah satu potensi besar kelautan yang menjadi perhatian pemerintah belakangan ini adalah produksi garam. Garam pernah berjaya di tanah air pada tahun 1990-an - 2002. Indonesia bahkan mengekspor garam ke Malaysia, Vietnam dan Cina (Rochwulaningsih, 2007). Namun dalam perkembangannya, garam rakyat mengalami dinamika yang kompleks dan kontradiktif, yaitu dari komoditas ekspor menjadi komoditas impor. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks, salah satunya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan garam nasional oleh produksi garam nasional.

Indonesia dengan garis pantai terpanjang ke-4 sepanjang  $\pm 81.000$  km, memiliki lahan tambak garam seluas 42.154,47 Ha di 10 propinsi dan daerah sentra penghasil garam di 9 kabupaten yang menempati area 15.033,41 Ha (Pusat KKP, 2012). Namun demikian Indonesia hanya menempati urutan ke-30 sebagai negara penghasil garam di dunia. Kondisi demikian sangat memprihatinkan, mengingat garam merupakan komoditi yang akan selalu dibutuhkan masyarakat

seperti halnya kebutuhan masyarakat akan makanan. Ini berarti peran garam dalam sisi ekonomis masih dikesampingkan.

Rendahnya produktivitas garam nasional disebabkan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada petambak garam, sehingga mereka dihadapkan pada kondisi sulit dan terpuruk serta dalam situasi marginal. Banyak petambak yang tidak dapat bertahan dan beralih usaha. Selain itu produksi garam yang masih menggunakan metode tradisional sangat tergantung pada kondisi iklim, sehingga mengakibatkan produksi garam Indonesia mengalami penurunan yang signifikan.

Terlepas dari kebijakan garam nasional yang belum menuai pencerahan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya memperbaiki keterpurukan komoditi garam nasional. Untuk mewujudkan visi "Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015", serta misi "Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan", maka KKP menempatkan kebutuhan garam nasional sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi kelautan (KKP, 2010). Usaha

tersebut direalisasikan dengan mencanangkan” Swasembada Garam Konsumsi 2012 dan Garam Industri 2014”.

Program Swasembada Garam akan memperkuat industri garam nasional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan garam nasional dan meniadakan impor garam. Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP), tolak ukur keberhasilan pencapaian target swasembada garam adalah Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

PUGAR adalah program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi petambak garam melalui prinsip *bottom-up*. Artinya

petambak garam akan terlibat dalam perencanaan program, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Pelaksanaan PUGAR oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten/kota melalui mekanisme yang telah ditentukan. Sedangkan Tugas Pembantuan dengan melibatkan Konsultan, Tenaga Pendamping (TP) dan Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM).

PUGAR yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012 dinilai berhasil. Hal ini dilihat dari indikator terealisasinya penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUGAR, bertambahnya jumlah KUGAR dan meningkatnya produksi garam, seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Realisasi Pelaksanaan PUGAR Nasional TA 2011-2012**

Tahun	Jumlah Peserta KUGAR	BLM PUGAR (Rp)	Target Produksi (Ton)	Realisasi Produksi (Ton)
2011	1.684	6,85 M	220.000	823.958
2012	3.305	9,80 M	1.300.000	2.473.716

Sumber : Diolah dari KPP 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Program PUGAR Tahun 2011 produksi garam meningkat 375% dari target, sedangkan tahun 2012 meningkat 190%. Dari pencapaian tersebut, kegiatan PUGAR dinilai berhasil, bahkan KKP merilis bahwa Indonesia telah mampu mencapai swasembada garam konsumsi pada tahun 2013.

Kabupaten Sumenep salah satu daerah sentra garam yang berpotensi sebagai penghasil garam rakyat, merupakan lokasi sasaran Program PUGAR dan telah melaksanakannya selama 2 tahun pada 2011 dan 2012. Adapun hasil pelaksanaan Program PUGAR dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Realisasi Pelaksanaan Program PUGAR Kabupaten Sumenep TA 2011-2012**

Tahun	Target Jumlah KUGAR (Kelompok)	Realisasi Jumlah KUGAR (Kelompok)	Target Penyaluran Dana BLM (Rp)	Realisasi Penyaluran Dana BLM (%)
2011	130	130	6.500.000.000	100
2012	305	330	8.600.500.000	100

Sumber : Diolah dari DKP Kab. Sumenep 2013

Plano mengatakan kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya Nakamura and Smallwood menjelaskan kebijakan publik adalah sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Pandangan lainnya dikemukakan oleh Jenkins yaitu kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Dari beberapa pengertian dan pendapat para pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebenarnya merupakan usaha bersama-sama untuk menyelesaikan masalah publik atau aksi kolektif untuk menyelesaikan dan memutuskan masalah bersama dimana aksi kolektif atau bersama dilakukan untuk membangun koalisi dan mempengaruhi *polity* dalam memecahkan masalah publik.

Dalam konteks ini, domain kebijakan publik dalam perkembangan saat ini merupakan proses transformasi masalah-masalah privat menjadi masalah-masalah publik. Contohnya saja dalam kebijakan di bidang kesehatan yang awalnya proses melahirkan bayi bagi setiap rumah tangga merupakan kebutuhan privat, namun dalam perkembangannya saat ini sudah menjadi kebutuhan publik yang diatur oleh pemerintah untuk menekan tingginya angka kematian bayi disaat melahirkan dengan menerbitkan kebijakan di bidang kesehatan yang mengharuskan ibu-ibu hamil memeriksa kehamilannya secara rutin di puskesmas-puskesmas terdekat hingga waktu melahirkan.

Pergeseran makna kebijakan publik ini tidak terlepas dari perkembangan keilmuan induk dari kebijakan publik

yaitu ilmu administrasi publik dimana tren perkembangan ilmu administrasi publik saat ini sudah mengarah kepada *publicness* atau kepublikan, yang menekankan kepada *public goods* dan *public interest*.

Oleh karenanya dalam upaya mensinergikan perkembangan keilmuan tersebut, maka perlu dilakukan sebuah analisis kebijakan publik. Beberapa pakar seperti dikutip Wahab (2012:40-41), mengemukakan pendapatnya. Dror mengatakan analisis kebijakan adalah suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks.

Kemudian Ericson mengatakan analisis kebijakan merupakan penyelidikan yang berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan. Selanjutnya Kent mendefinisikan analisis kebijakan merupakan sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah politik yang kongkret.

Pendapat yang berbeda diberikan oleh Budi Winarno (2012:34) tentang analisis kebijakan. Menurutnya, analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan dapat dilakukan analisis pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu.

Oleh karena itu ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik, yaitu: (a) Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan anjuran kebijakan yang "*pantas*"; (b) Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah; (c) Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya,

sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.

Pemikiran lain tentang analisis kebijakan diberikan oleh Dwiyanto Indiahono (2009:4-5). Ia menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendampingi klien dalam menghadapi masalah tertentu, mengenali masalah, mengembangkan alternatif kebijakan, menilai dan memprediksi kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan terbaik untuk menghadapi masalah yang dihadapi klien tersebut. Rincian lebih jelas dari makna ini adalah sebagai berikut:

- Analisis kebijakan merupakan aktivitas pendampingan  
Konsep ini memberikan makna bahwa seorang analis kebijakan merupakan profesi yang *establish* untuk mendampingi klien yang sedang menghadapi masalah. Dalam cakupan ini analisis kebijakan dapat dilakukan di sektor publik maupun di sektor privat. Di sektor publik pasti seorang konsultan harus menghadapi masalah-masalah publik dan kepentingan publik. Sedangkan di sektor privat, seorang konsultan akan menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan masalah privat, baik yang berhubungan dengan perusahaan dengan pihak eksternal maupun masalah-masalah yang terkait dengan internal perusahaan.
- Analisis kebijakan mengembangkan alternatif kebijakan  
Seorang analis kebijakan di sektor publik maupun di sektor privat diwajibkan untuk mengembangkan alternatif kebijakan, dimana dalam pengembangan alternatif kebijakan ini adalah dengan mendapatkan data dan informasi yang jelas melalui studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen kebijakan terdahulu, dokumen implementasi dan evaluasi program atau dokumen-dokumen lain yang relevan dengan masalah. Selain

untuk mengenali masalah, data dan informasi yang relevan juga dapat digunakan untuk mengembangkan alternatif kebijakan.

- Analisis kebijakan menilai dan memprediksi kebijakan  
Setelah mengembangkan alternatif kebijakan, tugas seorang analis kebijakan adalah melakukan penilaian dan meramalkan atas alternatif-alternatif kebijakan dan memberikan nasehat/pertimbangan kepada klien untuk mengambil suatu kebijakan dan prioritas kebijakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah.
- Analisis kebijakan merekomendasikan kebijakan terbaik  
Seorang analis kebijakan yang baik harus dapat memberikan rekomendasi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Walaupun dalam upaya memberikan rekomendasi kebijakan pasti berkaitan dengan orang banyak yang tentunya akan ada tekanan, kepentingan dan kekuatan politik yang dapat mendukung ataupun menentang rekomendasi yang dilakukan. Namun seorang analis kebijakan harus mampu memahami lingkungan kebijakan, sehingga kebijakan yang direkomendasikan kepada klien tidak bertentangan secara radikal dengan opini umum yang berlaku pada *setting* kebijakan yang sedang dibahas.

Selanjutnya Thomas R Dye (Kusumanegara, 2010:1-2) menjelaskan analisis kebijakan adalah deskripsi dan eksplanasi terhadap sebab-sebab dan konsekuensi berbagai macam kebijakan publik. Analisis kebijakan mempelajari apa yang dikerjakan pemerintah, mengapa pemerintah melakukan itu dan apa konsekuensi dari apa yang telah dilakukan pemerintah. Analisis kebijakan memberikan dorongan kepada kita untuk melontarkan isu yang kritis terhadap pemerintah dengan memanfaatkan perangkat dan penelitian yang sistematis.

Menurut Dye ada beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menganalisis suatu kebijakan, yaitu: (1) Mendeskripsikan kebijakan publik, dimana dengan kegiatan tersebut akan dapat diketahui apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah, misalnya dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pertahanan, aspek pendidikan, aspek energi dan sebagainya; (2) Mengkaji alasan-alasan yang mendorong pemerintah melancarkan kebijakan tertentu, misalnya meninjau mengapa pemerintah melakukannya, apakah ada perbedaan untuk kebijakan yang sama dari aktor yang berbeda, bagaimanakan dampak konflik yang terjadi antar aktor

dengan adanya kebijakan tertentu dan sebagainya; (3) Meneliti akibat kebijakan terhadap publik, misalnya melihat efek kebijakan yang ditimbulkan setelah diformulasikan dan diimplementasikan.

Analisis mengandung tujuan dan relasi yang berbeda dengan proses kebijakan. Sehingga analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas pada spektrum pengetahuan dalam (*in*) proses kebijakan, pengetahuan untuk (*for*) proses kebijakan dan pengetahuan tentang (*about*) proses kebijakan. Menurut Gordon (Parsons, 2011:56-57) secara defenitif menetapkan variasi analisis kebijakan sebagai berikut :

Gambar 1. Variasi Analisis Kebijakan



Sumber: Wayne Parsons (2011:56-57)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan:  
 (a) Analisis kebijakan mencakup determinasi kebijakan yaitu analisis yang berkaitan dengan cara pembuatan kebijakan, mengapa, kapan dan untuk siapa kebijakan dibuat, dan Isi kebijakan yaitu analisis yang mendeskripsikan tentang kebijakan tertentu dan bagaimana ia berkembang dalam hubungannya dengan kebijakan sebelumnya atau analisis yang juga didasari oleh informasi yang disediakan oleh kerangka nilai/teoritis yang mencoba memberikan kritik terhadap kebijakan;  
 (b) Monitoring dan evaluasi kebijakan fokus analisisnya adalah mengkaji bagaimana kinerja kebijakan dengan mempertimbangkan tujuan kebijakan dan apa dampak kebijakan terhadap suatu persoalan tertentu;  
 (c) Analisis untuk kebijakan mencakup Advokasi kebijakan yaitu berupa riset dan argument yang dimaksudkan untuk mempengaruhi

agenda kebijakan didalam atau diluar pemerintahan dan Informasi untuk kebijakan yaitu sebetuk analisis yang dimaksudkan untuk memberi informasi bagi aktivitas pembuatan kebijakan. Ini bisa berbentuk anjuran atau riset eksternal/internal yang terperinci tentang aspek kualitatif dan *judgemental* dari suatu kebijakan.

Dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan ada beberapa teori dan perspektif dalam hal komponen kunci dan cara-cara untuk melaksanakan implementasi yang sukses. Seperti kajian yang dilakukan oleh USAID (2010) tentang implementasi kebijakan kesehatan, yang menemukan tujuh dimensi atau instrument dalam implementasi kebijakan, yaitu :

- a) Kebijakan, formulasinya, dan penyebarannya
- Penilaian implementasi secara alami

dilihat dari konten kebijakan, proses formulasinya dan tingkat pengaruh sosialisasinya. *Pertama*, konten kebijakan harus membingkai secara jelas masalah yang dihadapi, tujuan dan sasaran kebijakan dan populasi yang mendapat manfaat, serta strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. *Kedua*, proses formulasi harus melibatkan *stakeholder* yang akan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. *Ketiga*, tingkat pengaruh sosialisasi harus mampu memberikan penjelasan pedoman operasional pelaksanaan (Juknis) kepada pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan.

- b) Konteks ekonomi, sosial dan politik  
Konteks sosial berpengaruh dalam budaya masyarakat, keberpihakan kepada perempuan dan sebagainya. Sedangkan konteks politik berpengaruh dalam penyesuaian kebijakan dalam tingkat lokal, termasuk partisipasi elit lokal dan kelembagaan lokal. Kemudian konteks ekonomi berpengaruh dalam identifikasi sasaran (kriteria masyarakat miskin) dan mekanisme pelaksanaan kebijakan.
- c) Kepemimpinan dalam implementasi kebijakan  
Komunikasi aktor kebijakan terhadap implementasi sangatlah penting, terutama terhadap tujuan dan sasaran kebijakan serta mekanisme pelaksanaan kebijakan. Selain itu juga koordinasi dan kooperasi perlu dilakukan oleh pimpinan kebijakan, agar tercipta *team work* yang solid dalam implementasi kebijakan.
- d) Melibatkan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan  
*Stakeholder* kebijakan mencakup kelompok-kelompok atau para individu (SDM) yang bertanggungjawab dalam implementasi, baik yang berpengaruh secara positif ataupun negatif. Selanjutnya *stakeholder* kebijakan harus memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Sebab bila tidak, maka bisa saja memunculkan

konflik dalam proses implementasi yang dilakukan.

- e) Perencanaan kebijakan dan mobilisasi sumberdaya  
Implementasi yang efektif membutuhkan perencanaan meliputi rencana strategi, rencana kerja, rencana anggaran dan instruksi-instruksi operasional pelaksanaan. Kemudian organisasi implementor harus mampu memperkirakan dan melakukan mobilisasi finansial, manusia dan material yang dibutuhkan dalam proses implementasi.
- f) Operasi dan pelayanan  
Proses implementasi kebijakan baru, biasanya menyita waktu dan mahal. Karena membutuhkan pembekalan pengetahuan melalui pelatihan kepada para pelaksana kebijakan. Oleh karenanya dibutuhkan fleksibilitas dalam mengadaptasi strategi kebijakan yang mempengaruhi kemampuan penyedia pelayanan. Serta memiliki kemampuan untuk merespon kebutuhan lokal dalam suatu kebijakan.
- g) *Feedback* pada saat proses dan hasil  
Melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan memang perlu, agar proses implementasi memiliki mekanisme kontrol yang jelas. Dimana pelaku monitoring bisa saja dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah, seperti masyarakat sipil, sektor publik, sektor privat dan media.

### C. PEMBAHASAN

Berdasarkan beberapa penjelasan dan pemaparan konsep analisis kebijakan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi setiap analis untuk melakukan penganalisisan kebijakan publik apapun. Sehingga dalam proses analisis kebijakan yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kepentingan publik sebagai pelaksana atau penerima kebijakan. Selain itu juga proses analisis kebijakan yang dilakukan dapat menentukan kelayakan suatu kebijakan publik untuk

terus dilaksanakan atau dihentikan, serta diberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam upaya mengatasi permasalahan publik yang muncul. Oleh karena itu dalam upaya melakukan analisis terhadap Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK - SP), penulis mengkajinya berdasarkan tujuh dimensi atau instrumen dalam implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh USAID (2010).

### **Kebijakan, formulasinya, dan penyebarannya**

Penilaian implementasi secara alami dilihat dari konten kebijakan, proses formulasinya dan tingkat pengaruh sosialisasinya. Konten kebijakan harus membongkai secara jelas masalah yang dihadapi, tujuan dan sasaran kebijakan dan populasi yang mendapat manfaat, serta strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan proses formulasi harus melibatkan *stakeholder* yang akan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Kemudian tingkat pengaruh sosialisasi harus mampu memberikan penjelasan pedoman operasional pelaksanaan (Juknis) kepada pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan.

Program ini lahir akibat dari keinginan Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan pengentasan kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur (K2I). Salah satu program yang dirancang dalam upaya mengentaskan kemiskinan adalah dengan meningkatkan ekonomi masyarakat. Provinsi melakukan kerjasama kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan program pemberdayaan desa (PPD). Program Pemberdayaan Desa (DPD) yang merupakan salah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat penguasaan masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi yang dilakukan dengan memperkuat kesempatan kepada

masyarakat untuk memilik kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akses modal. Sehingga timbul pemikiran pemerintah untuk memberikan bantuan modal usaha yang dikenal sebagai "*Dana Usaha Desa/Kelurahan*" bagi masyarakat miskin guna membantu mereka keluar dari himpitan ekonomi. Visi PPD adalah *mewujudkan masyarakat riau yang sejahtera dan mandiri sesuai dengan visi Riau 2020*. Sedangkan misi PPD adalah: (1) Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan; (2) Memperkuat kelembagaan masyarakat desa, mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) Mendorong para aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan PPD adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan menuju kemandirian desa. Sedangkan sasaran utama penerima PPD adalah desa/kelurahan yang memiliki relatif lebih banyak penduduk miskin sebagai lokasi sasaran program, dan berpihak pada masyarakat miskin yang kekurangan modal usaha.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada dimensi atau instrumen pertama bahwa Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK - SP) merupakan dana usaha yang dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat kelurahan sebagai dana bergilir, dimana dana usaha kelurahan terbuka terhadap segala usaha kegiatan ekonomi masyarakat. Prioritas jenis kegiatan yang dapat dibiayai dari dana usaha kelurahan diberikan kepada kegiatan yang mensejahterakan dan melibatkan banyak masyarakat miskin. Namun kenyataannya program ini dalam formulasinya sangat kecil melibatkan *stakeholder*, sehingga program ini mutlak lahir dari pimpinan daerah atau *policy maker* yang lebih cenderung bersifat *top down*. Akibatnya kriteria yang ditetapkan dalam program ini belum mewakili atau belum memiliki keberpihakan kepada masyarakat miskin

yang ingin menjadi sasaran dari program. Walaupun proses sosialisasi terhadap Program UEK - SP kepada masyarakat disetiap kelurahan sebenarnya sangat gencar dilaksanakan.

#### Konteks ekonomi, sosial, dan politik

Konteks sosial berpengaruh dalam budaya masyarakat, keberpihakan kepada perempuan dan sebagainya. Sedangkan konteks politik berpengaruh dalam penyesuaian kebijakan dalam tingkat lokal, termasuk partisipasi elit lokal dan kelembagaan lokal. Kemudian konteks ekonomi berpengaruh dalam identifikasi sasaran (kriteria masyarakat miskin) dan mekanisme pelaksanaan kebijakan.

Apabila dianalisis dari *konteks sosial* tentunya akan membahas kelompok sasaran yang akan menerima bantuan, terutama ditinjau dari kriteria kemiskinan yang ada pada kelompok sasaran. Kriteria kemiskinan yang berkembang di Kota Pekanbaru lebih identik kepada *kemiskinan absolut* dan *kemiskinan cultural*. Dimana *kemiskinan absolut* yang merupakan kemiskinan alami, dimana pada dasarnya masyarakat tersebut memang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Kota Pekanbaru kriteria masyarakat miskin seperti ini tidak terlalu besar, umum kaum pendatang yang mewakilinya. Misalnya pendatang dari Sumut, Sumbar atau provinsi lainnya. Mereka cenderung hidup sebagai buruh atau gepeng di Kota Pekanbaru. Sedangkan *kemiskinan cultural* merupakan kemiskinan budaya, dimana sikap seseorang atau masyarakat yang (karena disebabkan oleh faktor budaya) tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Di Kota Pekanbaru kriteria masyarakat miskin ini yang hampir banyak ditemukan, mereka katanya miskin tetapi memiliki HP, sepeda motor, TV dan mampu membayar rumah kontrakan. Akibatnya sudah banyak program kemiskinan yang menyentuh mereka, tetapi mereka tetap menyatakan dirinya miskin.

Kemudian apabila dianalisis dari *konteks politik* tentunya akan dilihat dari

keterlibatan *stakeholder*, terutama elit politik lokal dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Sebab realita yang ditemukan masih terlihat rendah partisipasi elit lokal dan kelembagaan lokal terhadap program-program kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah. Kasus UEK - SP di Kota Pekanbaru, programnya diserahkan kepada pengelola ditingkat kelurahan yang mana pemilihan pengelola UEK - SP dilakukan oleh pihak kelurahan yang katanya sudah berdasarkan keterwakilan masyarakat. Faktanya banyak yang menjadi ketua pengelola UEK - SP itu berasal dari tokoh masyarakat (agama, pendidikan, budaya dan sebagainya). Namun setelah terpilih elit lokal yang tidak terpilih memang sangat kurang peduli dengan pelaksanaan program UEK - SP yang dilakukan. Akibatnya masih ada penerima program yang bukan termasuk sasaran program. Begitu juga kelembagaan lokal, karena tidak dilibatkan dalam implementasi program membuat kelembagaan tersebut tidak mau ikut campur atau tidak peduli dengan pelaksanaan program yang dilakukan, seperti karang taruna, ikatan pemuda melayu dan sebagainya. Bahkan ada temuan yang terkadang elit lokal ikut serta sebagai penerima program dengan melibatkan beberapa masyarakat miskin yang ada diwilayahnya atau masyarakat yang dilibatkan dalam program UEK - SP itu masih memiliki kedekatan dengan para elit lokal.

Selanjutnya apabila dianalisis dari *konteks ekonomi* perlu dilakukan pengkajian tentang untung ruginya pelaksanaan program yang akan dilakukan, sehingga perlu dilakukan pengidentifikasian kelompok sasaran dengan jelas. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan mendefinisikan dan mengidentifikasi kemiskinan. Dampak dari kejelasan defenisi kemiskinan akan memberikan gambaran dalam menetapkan indikator atau kriteria kemiskinan yang akan dibantu. Sehingga dengan adanya indikator dan kriteria kemiskinan yang jelas, diharapkan program dapat tepat sasaran. Kasus Program UEK - SP di Kota Pekanbaru,

pendefinisian kemiskinan yang dilakukan belum jelas, sehingga tidak tahu masyarakat miskin seperti apa yang lebih dahulu akan dibantu dan indikatornya apa. Sebab langkah kedua menurut Muhamad Yunus setelah melakukan pendefinisian kemiskinan adalah membantu kelompok miskin yang paling membutuhkan terlebih dahulu. Sehingga dalam kasus kemiskinan di Kota Pekanbaru yang cenderung pada kemiskinan absolut dan kemiskinan cultural, maka kelompok miskin yang absolutlah seharusnya terlebih dahulu yang menerima bantuan.

### **Kepemimpinan dalam implementasi kebijakan**

Komunikasi aktor kebijakan terhadap implementasi sangatlah penting, terutama terhadap tujuan dan sasaran kebijakan serta mekanisme pelaksanaan kebijakan. Koordinasi dan kooperasi perlu dilakukan oleh pimpinan kebijakan, agar tercipta *team work* yang solid dalam implementasi kebijakan.

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan sangatlah penting dalam upaya menyampaikan pesan dari suatu kebijakan. Komunikasi yang dilakukan dalam upaya memberikan informasi dan mensosialisasikan program kepada masyarakat, terutama kepada calon penerima program. Komunikasi ini perlu karena akan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan mekanismenya.

Dalam Kasus UEK - SP di Kota Pekanbaru, sosialisasi program masih belum berjalan maksimal. Artinya tidak semua masyarakat miskin mendapatkan informasi tentang adanya program tersebut. Bahkan umumnya masyarakat miskin mengetahui adanya program setelah 2 tahun pelaksanaannya. Koordinasi dan kooperasi merupakan proses memadukan dan menyatukan komitmen aktor kebijakan dalam implementasi, sehingga akan terbentuk budaya kerja yang kondusif diantara pelaksana kebijakan. Kasus Program UEK - SP di Kota Pekanbaru, koordinasi dan kooperasi dalam implementasi antara otoritas, pendamping dan pengelola

Program UEK - SP sudah berjalan. Namun masih bersifat formalitas dan rutinitas saja.

### **Melibatkan stakeholder dalam implementasi kebijakan**

*Stakeholder* kebijakan mencakup kelompok-kelompok atau para individu (SDM) yang bertanggungjawab dalam implementasi, baik yang berpengaruh secara positif ataupun negatif. *Stakeholder* kebijakan harus memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Sebab bila tidak, maka bisa saja memunculkan konflik dalam proses implementasi yang dilakukan. Apabila ditinjau dari sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan terdiri dari otoritas, pendamping dan pengelola Program UEK - SP. Otoritas bertugas dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan dana usaha Desa/Kelurahan dan memiliki wewenang memberhentikan pihak pengelola UEK-SP yang melakukan penyimpangan berdasarkan hasil musyawarah kelurahan. Fakta ini memberikan peluang kepada otoritas untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan Program UEK - SP, sehingga dalam pelaksanaannya dapat tepat sasaran. Namun kenyataannya banyak otoritas hanya menerima hasil laporan pelaksanaan saja dari pengelola, sehingga kewenangan penuh implementasi Program UEK - SP memang berada ditangan pengelola.

Pendamping bertugas dan bertanggungjawab sebagai pengawas ditingkat Kabupaten/Kota. selain itu juga pendamping bertugas memberikan pembimbingan dan pembinaan serta pembelajaran kepada Pengelola UEK-SP dalam bentuk pelatihan, rapat koordinasi bulanan, *in Service Training* (IST), serta *On Job Training* (OJT) dilapangan. Realitasnya banyak pendamping yang tidak memberikan pelatihan kepada pengelola Program UEK - SP, terutama in *Service Training* (IST) dan *On Job Training* (OJT) dilapangan. Sedangkan yang rutin dilakukan hanyalah rapat koordinasi bulanan. Perekrutan tenaga pendamping dilakukan oleh Badan Pemberdayaan dan

Perlindungan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau yang berasal dari sarjana seluruh jurusan. Akibatnya banyak tenaga pendamping yang tidak memiliki pengalaman dalam program pendampingan sosial sehingga sulit untuk melaksanakan tugasnya. Pengelola Program UEK - SP berasal dari masyarakat kelurahan setempat yang diusulkan kepada pihak kelurahan dan diputuskan berdasarkan musyawarah kelurahan. Biasanya yang terpilih sebagai Ketua Program UEK - SP merupakan tokoh akademisi, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya pengelola yang kaku akan SOP yang sudah ditetapkan, maka akan sedikit pemanfaat program. tetapi yang tidak terlalu kaku akan SOP, maka pemanfaat programnya akan banyak.

#### **Perencanaan kebijakan dan mobilisasi sumberdaya**

Implementasi yang efektif membutuhkan perencanaan meliputi rencana strategi, rencana kerja, rencana anggaran dan instruksi-instruksi operasional pelaksanaan. Organisasi implementor harus mampu memperkirakan dan melakukan mobilisasi finansial, manusia dan material yang dibutuhkan dalam proses implementasi.

Ketersediaan finansial dalam pelaksanaan program UEK - SP sudah cukup memenuhi, karena penguliran modal usaha dilakukan secara bertahap berdasarkan kegiatan pemanfaat yang ada pada masing-masing kelurahan. Modal awal pengelola UEK - SP adalah Rp. 500.000.000. Jika perkembangannya baik, modal usaha akan ditambah sampai akhirnya UEK - SP berubah menjadi Bumdes yang bisa mandiri sendiri.

Ketersediaan SDM atau manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Program UEK - SP sebenarnya sudah mencukupi, tinggal mengasah pengetahuan dan memberikan pelatihan dalam upaya mendukung pelaksanaan program yang berhasil. Ketersediaan material, baik gedung atau peralatan kerja sudah cukup memadai. Hampir disetiap desa pengelola Program UEK - SP sudah memiliki tempat sendiri

dengan memanfaatkan ruang di Kantor Kelurahan atau memang sudah memiliki gedung sendiri.

#### **Operasi dan pelayanan**

Proses implementasi kebijakan baru, biasanya menyita waktu dan mahal. Karena membutuhkan pembekalan pengetahuan melalui pelatihan kepada para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu dibutuhkan fleksibilitas dalam mengadaptasi strategi kebijakan yang bisa mempengaruhi kemampuan penyedia pelayanan dalam implementasi kebijakan, termasuk juga dalam merespon kebutuhan lokal dalam suatu kebijakan.

Dalam kasus Program UEK - SP, pelatihan seharusnya diberikan kepada pengelola Program UEK - SP yang langsung berhadapan dengan para sasaran program. Realitasnya pelatihan disediakan namun belum maksimal dilakukan oleh pendamping kebijakan. Seharusnya pelatihan diberikan secara bertahap kepada pengelola dari mulai program belum dilaksanakan sampai sudah dilaksanakan.

Selain itu juga dalam implementasi Program UEK - SP memang dibutuhkan derajat fleksibilitas yang tinggi, terutama dalam mentolerir agunan yang diberikan dan kriteria usaha yang ditetapkan sebagai persyaratan. Sebab bila tidak fleksibilitas maka pemanfaat program akan rendah, karena tidak mampu memenuhi persyaratan. Kemudian dibutuhkan juga kemampuan merespon kebutuhan lokal sangat penting dalam proses implementasi Program UEK - SP, terutama dalam memberikan solusi lain terhadap persyaratan yang sudah ditetapkan dapat menikmati modal sosial yang diberikan, seperti persyaratan-persyaratan sebagai pemanfaat.

#### **Feedback pada saat proses dan hasil**

Melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan memang perlu, agar proses implementasi memiliki mekanisme kontrol yang jelas. Pelaku monitoring bisa saja dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah, seperti masyarakat sipil, sektor publik, sektor privat dan media.

Monitoring yang utama perlu dilakukan pada persyaratan calon pemanfaat program, apabila tidak ada kejelasan pemaknaan maka akan banyak penyelewengan dalam implementasi, terutama dalam penetapan calon penerima program. Pelatihan bagi para pemanfaat perlu dilakukan dalam upaya memberikan pengetahuan tentang bagaimana mengelola modal sosial yang diterimanya dalam upaya membantu mengembangkan ekonomi keluarga dan meningkatkan pendapatan keluarga sehingga modal sosial yang diterima tidak dimanfaatkan untuk membeli produk yang sifatnya praktis.

Monitoring hendaknya dilakukan oleh semua pihak, terutama masyarakat lokal yang paham betul terhadap kelayakan setiap calon pemanfaat. Sehingga tidak ada lagi ditemukan pemanfaat yang tidak sesuai dengan SOP.

#### D. KESIMPULAN

Pengentasan kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks untuk bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang singkat. Sebab masalah kemiskinan hampir disetiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga sulit dicarikan formula yang sama dalam upaya mengentaskannya. Belum lagi menghadapi respon dan persepsi masyarakat miskin yang berbeda-beda terhadap program-program kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, yang terkadang dapat mengakibatkan terjadi kegagalan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang spesifik dari para ilmuwan kebijakan publik untuk bisa menemukan formula yang paling efektif dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi.

Penelitian ini menemukan masih adanya pemanfaat Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui kegiatan usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK - SP) yang ternyata bukan kelompok sasaran. Dampaknya dana yang disediakan sebagai modal sosial lebih cenderung digunakan oleh kelompok pemanfaat yang bukan dari masyarakat miskin. Fakta ini semakin didukung oleh kriteria dan persyaratan dalam mengikuti

program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK - SP) yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat miskin. Misalnya saja harus memiliki usaha terlebih dahulu dan memiliki agunan untuk memperoleh bantuan modal usaha. Realitas ini tentunya akan sangat mempersulit bagi masyarakat miskin untuk bisa mengikuti program, karena jarang masyarakat miskin yang ada memiliki agunan dan usaha yang dipersyaratkan dalam mengikuti program yang digulirkan.

Keterlibatan elit lokal dan akademisi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan juga masih rendah sehingga program sulit dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif, karena evaluasi yang dilakukan hanya dari pihak internal pelaksana program saja. Selain itu juga ketidakjelasan kelompok sasaran yang bisa memanfaatkan program menjadi dasar implementasi program yang kurang tepat sasaran. Akibatnya program yang dilaksanakan lebih cenderung dimanfaatkan masyarakat yang bukan miskin. Selain itu, rasa peduli *stakeholder* terhadap implementasi program masih rendah. Akibat dari ketidakpedulian tersebut menyebabkan *control social* terhadap program ini tidak berjalan. Sehingga apabila ada penyimpangan terhadap pelaksanaan program masyarakat lainnya tidak memperdulikan kondisi tersebut.

Kemudian dari analisis yang dilakukan, juga dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, perlu dilakukan pemisahan petunjuk teknis terhadap dua kegiatan Program Pemberdayaan Desa (PPD), yaitu kegiatan reguler perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui Sektoral dan kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan - Simpan Pinjam (UED/K-SP). Sehingga dengan adanya pemisahan ini akan semakin memperjelas pelaksanaan masing-masing kegiatan yang diamanahkan melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD).

Kedua, perlu dilakukan penelaahan atau analisis kebijakan yang komprehensif, agar ada kejelasan sebenarnya program ini diperuntukkan untuk siapa, masyarakat miskin atau masyarakat Kota Pekanbaru. Oleh karenanya perlu dilakukan kajian yang menyeluruh untuk bisa menganalisis Program Pemberdayaan Desa (PPD), terutama *benefeceries* program yang diterima dari pelaksanaan yang sudah ± 6 tahun. Selain itu juga hasil kajian yang dilakukan bisa memunculkan alternatif-alternatif kebijakan yang tepat untuk bisa menjawab permasalahan pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau umumnya.

#### Daftar Pustaka

- Anderson, James E., 1979., "Public Policy Making"., Holt, Rinchard & Winston., New York.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009., *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analisis.*, Gava Media., Yogyakarta.
- Jones, Charles O, 1970., *An Introduction to the Study of Public Policy.*, Belmont, CA : Wadsworth.
- Kusumanegara, Solahuddin, 2010., *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik.*, Gava Media., Yogyakarta.

- Parsons, Wayne, 2011., *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.*, Kencana Prenada Media Group., Jakarta.
- Safi'i, H.M, 2009., *Manajemen Pembangunan Daerah : Teori dan Aplikasi.*, Averroes Press., Malang.
- Subarsono, Agustinus, 2012., *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi.*, Pustaka Pelajara., Yogyakarta.
- USAID., 2010., *Taking The Pulse Of Policy : The Policy Implementation Assessment Tool.*, This publication was produced for review by the U.S. Agency for International Development (USAID). It was prepared by Anita Bhuyan, Anne Jorgensen, and Suneeta Sharma of the Health Policy Initiative, Task Order 1.
- Wahab, Solichin Abdul, 2012., *Analisis Kebijakan Publik : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik.*, Bumi Aksara., Jakarta.
- Winarno, Budi, 2012., *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus.*, Penerbit CAPS., Yogyakarta.